Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial (Al-Waarits)
Vol. 3, No. 1, Maret 2026, pp. 94∼105
E-ISSN: 2964-9897 | P-ISSN: 2963-1955, DOI: 10.34306

The Influence of Information Technology on Social Policies Based on Islamic Values

Pengaruh Teknologi Informasi pada Kebijakan Sosial Berlandaskan Nilai Islam

Siti Nur Azizah[1*], Adhi Widyakto[2], Thomas Green[3]
[1]Fakultas Magister Management Department, Universitas Putra Bangsa, Indonesia
[2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Diponegoro University, Indonesia
[3]Departemen Agama Islam, Eesp Incorporation, Samudra Hindia Britania
[1]sitinuraziz@yahoo.com, [2]adhiwidyakto92@gmail.com, [3]thom.green@eesp.io
***Penulis Koresponden**

Article Info

Article history:

Submit November 29, 2025
Revisi Februari 24, 2026
Diterima Februari 26, 2026
Diterbitkan Maret 30, 2026

Kata Kunci:
Teknologi Informasi
Kebijakan Sosial
Institusi Pemerintahan
Digital
Implementasi Kebijakan

Keywords:
Information Technology
Social Policy
Government Institutions
Digital Public Services
Policy Implementation

ABSTRACT

This study examines in depth the influence of information technology on the implementation of social policies grounded in Islamic values within government institutions, in line with the increasing digital transformation that demands more efficient and transparent public governance, as well as the provision of fair and equitable services to society at large. **The objective of this study** is to analyze how the utilization of information technology can strengthen the effectiveness of social policies based on Islamic principles such as justice (*adl*), trustworthiness (*amanah*), public benefit (*maslahah*), and accountability across all public service processes. **This study employs** a mixed-methods approach by combining quantitative surveys administered to government officials with in-depth qualitative interviews involving policymakers and policy implementers across various government institutions that have integrated digital systems into social service delivery. **The research findings indicate** that information technology contributes significantly to accelerating service workflows, facilitating access to policy-related information, enhancing transparency oversight, and reinforcing the application of Islamic values through the provision of more responsive and accountable services; however, several challenges are also identified, including disparities in digital literacy, system complexity, limitations in technological infrastructure, and data security concerns that require serious attention. **This study concludes** that the integration of information technology with Islamic value-based social policies holds substantial potential to improve the quality of public governance and to realize ethical, effective, and maslahah-oriented public services. Nevertheless, successful implementation requires strategic planning, strengthening human resource competencies, and the development of ethical guidelines to ensure that the use of technology remains aligned with Islamic principles.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaruh teknologi informasi dalam implementasi kebijakan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam di institusi pemerintahan, seiring dengan meningkatnya transformasi digital yang menuntut tata kelola publik lebih efisien, transparan, serta mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. **Tujuan penelitian ini** adalah menganalisis bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat mem-

perkuat efektivitas kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*adl*), amanah, kemaslahatan (*maslahah*), dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan publik. **Penelitian ini menggunakan** pendekatan campuran dengan menggabungkan survei kuantitatif kepada aparatur pemerintah serta wawancara kualitatif mendalam dengan pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan di berbagai instansi pemerintahan yang telah mengintegrasikan sistem digital dalam layanan sosial. **Hasil penelitian menunjukkan** bahwa teknologi informasi berkontribusi signifikan dalam mempercepat alur pelayanan, mempermudah akses terhadap informasi kebijakan, meningkatkan transparansi dan pengawasan, serta memperkuat penerapan nilai-nilai Islam melalui penyediaan layanan yang lebih responsif dan akuntabel; namun ditemukan pula beberapa hambatan seperti ketimpangan literasi digital, kompleksitas sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta isu keamanan data yang menuntut perhatian serius. **Penelitian ini menyimpulkan** bahwa integrasi teknologi informasi dengan kebijakan sosial bernilai Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang etis, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan, tetapi keberhasilan implementasinya membutuhkan perencanaan strategis, penguatan kompetensi SDM, serta penyusunan pedoman etika yang memastikan pemanfaatan teknologi tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.



DOI: https://doi.org/10.34306/alwaarits.v3i1.1009
This is an open-access article under the CC-BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
©Authors retain all copyrights

1. PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital yang berkembang dengan sangat cepat, institusi pemerintahan dituntut untuk menerapkan sistem tata kelola publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat [1, 2]. Tuntutan ini sejalan dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDGs 16 yang menekankan penguatan institusi yang efektif, inklusif, dan akuntabel, serta SDGs 9 terkait inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan. Di tingkat nasional, komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan pemerintah Indonesia sebagai kerangka transformasi digital untuk meningkatkan kualitas dan keterpaduan layanan publik [3]. Teknologi informasi dengan demikian menjadi fondasi penting dalam mendukung proses administrasi, pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan sosial di berbagai sektor pemerintahan [4, 5].

Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, integrasi teknologi informasi dalam kebijakan sosial tidak hanya berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan umat [6]. Pandangan ini menegaskan bahwa digitalisasi kebijakan sosial harus tetap berpijak pada landasan moral yang kokoh agar setiap inovasi teknologi berjalan selaras dengan etika Islam dan kebutuhan masyarakat luas [7, 8]. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"innallâha ya'muru bil-'adli wal-isâni wa îtâ'i dzil-qurbâ wa yan-hâ 'anil-fasyâ'i wal-mungkari wal-baghyi ya'idhukum la'allakum tadzakkarûn"
(Q.S. An-Nahl: 90)

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl: 90)

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara institusi pemerintahan mengelola program sosial melalui penerapan *e-government*, layanan digital terpadu, dan sistem data terintegrasi yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik [9, 10]. Namun, pemanfaatan teknologi memerlukan landasan nilai moral agar tidak hanya berorientasi teknis. Prinsip Islam seperti keadilan ('adl), amanah, dan

kemaslahatan menyediakan kerangka etis dalam merancang sistem informasi yang akuntabel dan berintegritas [11]. Selain itu, teknologi membuka peluang penerapan konsep hisbah sebagai mekanisme pengawasan digital untuk memastikan kebijakan sosial berjalan sesuai regulasi dan etika syariah, sehingga pemerintahan digital tidak hanya modern, tetapi juga bermartabat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat [12, 13].

Meskipun demikian, implementasi teknologi informasi dalam kebijakan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi aparatur pemerintah terhadap perubahan [14, 15]. Selain itu, isu keamanan data, perlindungan privasi, dan potensi penyalahgunaan informasi menjadi perhatian penting [16]. Dalam perspektif Islam, pengelolaan data publik merupakan bagian dari amanah yang menuntut tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan dan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi SDM, penyediaan infrastruktur digital yang memadai, peningkatan literasi teknologi, serta penerapan standar etika berbasis nilai-nilai Islam guna mewujudkan digitalisasi kebijakan sosial yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada kemaslahatan [17, 18].

Berdasarkan peluang dan tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap implementasi kebijakan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam di institusi pemerintahan. Penelitian ini mengevaluasi peran sistem informasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan sosial, memperkuat nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam tata kelola, serta membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas digital. Selain itu, studi ini mengidentifikasi hambatan struktural, teknis, dan etis dalam integrasi teknologi, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan pemerintahan digital yang efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sistem informasi dalam sektor publik memainkan peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel [19]. Dalam konteks *e-government*, teknologi informasi dimanfaatkan untuk mengintegrasikan proses administrasi, pengelolaan data, serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat [20, 21]. Penerapan sistem informasi memungkinkan instansi pemerintah meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat alur layanan, dan mengurangi praktik maladministrasi melalui otomasi proses dan pencatatan digital [22, 23].

Dalam perspektif administrasi publik Islam, penggunaan teknologi dalam pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip amanah dan ‘adl (keadilan) [24]. Sistem informasi tidak hanya dipahami sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan secara adil dan bertanggung jawab [25]. Oleh karena itu, tata kelola digital yang baik menuntut integrasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai etis Islam agar pemerintahan digital tidak sekadar efisien, tetapi juga bermoral [26].

2.2. Transformasi Digital dan *E-government* dalam Kebijakan Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dipersepsikan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi kebijakan sosial digital di institusi pemerintahan [27, 28]. Pemanfaatan sistem informasi dinilai membantu membuat proses pelayanan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan relatif lebih mudah dipantau [29, 30]. Beberapa aparatur pemerintah menyampaikan bahwa integrasi sistem digital berkontribusi dalam memperlancar alur pelayanan serta mengurangi kesalahan administratif yang kerap muncul pada proses manual, meskipun tingkat efektivitasnya berbeda antar unit kerja [31].

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan sistem yang digunakan, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan pemahaman sumber daya manusia. Sejumlah responden mengungkapkan bahwa tanpa pemahaman etis dan rasa tanggung jawab moral, sistem digital berpotensi digunakan secara tidak optimal, termasuk dalam pengelolaan data penerima kebijakan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa teknologi informasi berfungsi sebagai sarana pendukung, bukan faktor tunggal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

2.3. Layanan Publik Digital dan Nilai-Nilai Publik Islam

Layanan publik digital merupakan wujud konkret dari pemanfaatan teknologi informasi dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat [32, 33]. Melalui portal layanan terpadu, aplikasi mobile, dan sistem pengaduan daring, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan sosial secara lebih mudah, cepat, dan

transparan [34, 35]. Digitalisasi layanan publik juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat serta memperkuat akuntabilitas pemerintah [36].

Dalam administrasi publik Islam, nilai ihsan, amanah, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik [24, 37]. Layanan digital yang baik harus memastikan tidak adanya diskriminasi, menjamin keterbukaan informasi, serta menjaga hak-hak masyarakat, termasuk perlindungan data pribadi [38]. Integrasi nilai-nilai Islam dalam layanan publik digital memperkuat orientasi pelayanan pada keadilan sosial dan tanggung jawab moral, sehingga teknologi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hubungan antara negara dan warga [39, 40].

2.4. Tantangan Implementasi Teknologi Informasi di Institusi Pemerintah

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, implementasi teknologi informasi di institusi pemerintah menghadapi sejumlah tantangan. Kesenjangan literasi digital aparatur, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan utama dalam transformasi digital sektor publik [41, 42]. Selain itu, kompleksitas sistem dan kurangnya integrasi antarlembaga dapat mengurangi efektivitas penggunaan teknologi dalam mendukung kebijakan sosial [43, 44].

Isu keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian krusial. Dalam perspektif Islam, pengelolaan data publik merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga, karena menyangkut hak dan martabat masyarakat [45, 46]. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut menerapkan standar keamanan informasi yang kuat serta membangun budaya etika digital di kalangan aparatur. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi TI dalam pemerintahan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan SDM dan komitmen etis institusi [47, 48].

3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods [49] yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap implementasi kebijakan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam pada institusi pemerintahan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan transformasi digital dalam birokrasi tidak hanya dapat dijelaskan melalui angka statistik, tetapi juga membutuhkan penafsiran mendalam terkait nilai, prinsip moral, dan konteks sosial keagamaan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam praktik nyata ketika teknologi informasi digunakan dalam sistem pemerintahan.

Desain ini memungkinkan peneliti menangkap perubahan perilaku organisasi, efektivitas sistem informasi, serta persepsi pegawai terhadap penerapan nilai-nilai etika Islam dalam kebijakan publik digital. Dengan demikian, mixed methods memberikan peluang untuk memadukan data numerik dengan narasi mendalam sehingga hasil penelitian dapat menjawab permasalahan secara menyeluruh. Pendekatan ini juga mendukung validitas temuan karena memungkinkan pembandingan antara hasil survei dan hasil wawancara, sehingga data dapat saling memperkuat satu sama lain.

3.2. Populasi, Sampel, dan Pengumpulan Data

Populasi penelitian meliputi seluruh pegawai dan pejabat yang terlibat dalam implementasi kebijakan sosial digital di institusi pemerintahan. Penentuan sampel kuantitatif dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut mencakup pengalaman minimal dua tahun dalam penggunaan sistem informasi pemerintahan, keterlibatan dalam proses penyusunan atau pelaksanaan kebijakan sosial, serta pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks administrasi publik. Sebanyak 120 responden aparatur pemerintah berpartisipasi dalam penelitian ini, yang berasal dari berbagai institusi pemerintahan dan mencakup beberapa wilayah administratif di Indonesia.

Sementara itu, teknik snowball sampling [50] digunakan untuk menentukan sampel wawancara kualitatif agar peneliti menemukan informan yang benar-benar memahami dinamika digitalisasi kebijakan sosial. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan informan memberikan penjelasan luas sesuai pengalaman mereka. Selain itu, data sekunder berupa dokumen kebijakan, SOP digital, laporan kin-

erja, serta pedoman etika pemerintahan dikumpulkan guna memperkaya data dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Kombinasi berbagai jenis data ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang utuh dan valid.

3.3. Instrumen dan Variabel Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kuantitatif ini adalah kuesioner berbasis skala Likert 1–5 yang mencakup tiga konstruk utama, yaitu teknologi informasi sebagai variabel independen, implementasi kebijakan sosial sebagai variabel dependen, serta nilai-nilai Islam sebagai variabel moderasi normatif yang memengaruhi arah dan kekuatan pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik pemerintahan. Setiap konstruk dioperasionalkan ke dalam sejumlah indikator yang disusun berdasarkan teori manajemen publik modern, teori sistem informasi manajemen, serta literatur administrasi Islam. Untuk menjamin validitas isi, instrumen ini telah melalui proses expert judgment oleh tiga pakar yang memiliki keahlian di bidang *e-government*, kebijakan publik, dan kajian Islam, sehingga mampu merepresentasikan aspek teknis dan nilai-nilai keagamaan secara proporsional. Struktur variabel penelitian beserta indikator pengukurannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	**Indikator Utama**
Teknologi Informasi	Ketersediaan sistem, integrasi antar platform, kemudahan akses, efisiensi layanan
Nilai-Nilai Islam	Keadilan, amanah, kemaslahatan, ihsan
Kebijakan Sosial Digital	Transparansi, akuntabilitas, efektivitas implementasi, pelayanan publik

Instrumen wawancara berisi daftar pertanyaan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan melalui teknologi informasi, bagaimana pegawai memahami etika digital dalam pemerintahan, serta bagaimana sistem informasi mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan sosial.

Tabel 1 menyajikan rangkuman metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini, mencakup pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, partisipan, serta metode analisis data. Tabel ini memberikan gambaran terstruktur mengenai keseluruhan desain penelitian sehingga memudahkan pembaca memahami kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh sistem informasi pendidikan terhadap aksesibilitas pembelajaran di perguruan tinggi. Informasi dalam tabel tersebut juga menunjukkan bagaimana setiap komponen metode saling berhubungan serta mendukung tujuan penelitian secara menyeluruh.

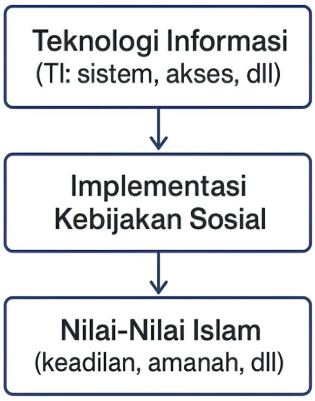
3.4. Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan regresi linier untuk mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi informasi dan nilai-nilai Islam terhadap efektivitas implementasi kebijakan sosial. Uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan model yang dihasilkan memiliki akurasi tinggi. Selain itu, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden dan tingkat penerapan teknologi informasi di institusi terkait.

Data kualitatif dianalisis dengan metode analisis tematik, yang mencakup proses membaca data secara mendalam, melakukan pengkodean, mengidentifikasi pola-pola, dan mengelompokkan narasi ke dalam tema utama. Teknik triangulasi metode dilakukan untuk memperoleh konsistensi antara data kuantitatif dan kualitatif, sehingga hasil penelitian lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.5. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini dirancang untuk menggambarkan hubungan logis antar variabel, di mana teknologi informasi dan nilai-nilai Islam bertindak sebagai variabel independen yang memengaruhi implementasi kebijakan sosial. Model ini digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan instrumen penelitian dan menentukan arah analisis statistik.



Gambar 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Kerangka penelitian ini menekankan bahwa penerapan teknologi informasi dalam institusi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip moral Islam yang mengedepankan amanah, keadilan, dan transparansi, sehingga implementasi kebijakan sosial digital dapat menghasilkan dampak yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Gambar 1 menggambarkan model konseptual hubungan antar variabel dalam penelitian ini, di mana teknologi informasi diposisikan sebagai variabel independen yang memengaruhi implementasi kebijakan sosial sebagai variabel dependen, sementara nilai-nilai Islam berperan sebagai variabel moderasi normatif yang mengarahkan dan memperkuat pengaruh teknologi informasi tersebut. Kerangka ini menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan teknologi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh internalisasi nilai-nilai etis Islam dalam praktik pemerintahan digital.

Dengan demikian, nilai-nilai Islam dalam penelitian ini tidak diperlakukan sebagai faktor teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai landasan normatif yang memoderasi hubungan antara teknologi informasi dan implementasi kebijakan sosial. Artinya, keberhasilan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja kebijakan sosial sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai Islam diinternalisasikan oleh aparatur dalam praktik digital pemerintahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Temuan Penelitians

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan dari respon aparatur pemerintah yang terlibat dalam implementasi kebijakan sosial berbasis digital di institusi pemerintahan. Analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pemanfaatan teknologi informasi telah berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan sosial, khususnya dalam aspek kecepatan layanan, kemudahan akses informasi, dan koordinasi antar unit kerja. Temuan ini diperkuat oleh hasil analisis regresi yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan efektivitas implementasi kebijakan sosial.



Gambar 2. Visualisasi hasil dan pembahasan yang menggambarkan hubungan antara penggunaan video pembelajaran digital dengan peningkatan pemahaman konsep Aqidah siswa sekolah dasar.

Gambar 2 menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran digital memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman konsep Aqidah. Temuan ini sejalan dengan teori media pembelajaran yang menyatakan bahwa visualisasi dapat membantu meningkatkan daya serap informasi siswa.

Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan, dipersepsikan sebagai faktor penting yang memengaruhi cara aparatur menggunakan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan. Data kualitatif dari wawancara mengungkap bahwa aparatur yang memiliki pemahaman etika Islam yang kuat cenderung lebih berhati-hati dalam pengelolaan data publik, lebih transparan dalam proses digital, serta lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dibandingkan sekadar pencapaian target administratif.

4.2. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi Kebijakan Sosial Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi informasi berkontribusi signifikan dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung implementasi kebijakan sosial digital di institusi pemerintahan. Sistem informasi memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Aparatur pemerintah menyatakan bahwa integrasi sistem digital membantu mempercepat alur pelayanan serta meminimalkan kesalahan administratif yang sebelumnya sering terjadi dalam proses manual.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan teknologi informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya. Beberapa responden menegaskan bahwa tanpa pemahaman etis dan tanggung jawab moral, sistem digital berpotensi disalahgunakan, misalnya dalam pengelolaan data penerima kebijakan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa teknologi informasi berfungsi sebagai alat, bukan penentu tunggal keberhasilan kebijakan.

4.3. Peran Nilai-Nilai Islam dalam Memoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam membentuk perilaku aparatur pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi. Nilai amanah dipahami sebagai kewajiban moral untuk menjaga keakuratan data dan mencegah penyalahgunaan kewenangan digital. Nilai keadilan mendorong aparatur untuk memastikan bahwa kebijakan sosial digital diimplementasikan secara merata dan tidak diskriminatif, sementara nilai kemaslahatan mengarahkan penggunaan teknologi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Data kualitatif menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga memengaruhi praktik kerja sehari-hari, seperti kehati-hatian dalam akses data, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab terhadap keputusan digital. Dengan demikian, nilai-nilai Islam berfungsi sebagai landasan etis yang membimbing pemanfaatan teknologi informasi dalam kebijakan sosial.

Tabel 2. Hasil dan Pembahasan Penelitian

No	Aspek yang Dianalisis	Temuan Hasil Penelitian	Pembahasan
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sosial	Teknologi informasi mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi data.
2	Integrasi Nilai-nilai Islam	Memperhatikan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan	Kebijakan tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga sesuai dengan prinsip etika Islam
3	Efektivitas Layanan Publik	Peningkatan kualitas layanan sosial	Digitalisasi membantu meningkatkan kualitas layanan sosial
4	Tantangan Implementasi	Keterbatasan literasi digital dan kesiapan infrastruktur	Diperlukan peningkatan kompetensi SDM dan dukungan kebijakan
5	Dampak Kebijakan Sosial	Peningkatan kualitas kebijakan sosial secara berkelanjutan	Mendukung kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

Tabel 2 menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran digital memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman materi Aqidah pada siswa sekolah dasar. Media video terbukti mampu meningkatkan minat belajar, mempermudah siswa memahami konsep yang bersifat abstrak, serta mendorong keterlibatan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Penyajian materi secara visual dan audio membantu siswa menerima informasi secara lebih jelas, sistematis, dan mudah diingat dibandingkan metode konvensional. Selain itu, penggunaan video pembelajaran juga berdampak pada peningkatan hasil evaluasi belajar siswa, yang menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pada materi Aqidah. Temuan ini memperkuat bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan meningkatkan pemahaman konseptual siswa secara lebih optimal.

4.4. Sintesis Temuan dan Diskusi Teoretis

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi kebijakan sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya peningkatan efisiensi layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi informasi bersifat tidak netral, karena efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melandasi penggunaannya. Dalam konteks institusi pemerintahan, internalisasi nilai-nilai Islam berfungsi sebagai mekanisme etis yang mengarahkan aparatur agar penggunaan teknologi tetap berorientasi pada tanggung jawab publik dan kepentingan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kebijakan digital dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya berperan sebagai prinsip normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam praktik tata kelola pemerintahan digital. Temuan ini menantang pendekatan teknokratis yang menempatkan teknologi sebagai faktor dominan, dengan menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh integrasi antara kapasitas teknologi dan kualitas etika aparatur pemerintah.

4.5. Dimensi Etika Digital Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa etika digital Islam merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan sosial berbasis teknologi. Nilai amanah berfungsi sebagai prinsip pengendali dalam pengelolaan data publik, sehingga aparatur tidak hanya berfokus pada efisiensi sistem, tetapi juga pada tanggung jawab moral atas data dan keputusan digital yang diambil. Dalam konteks ini, keamanan data tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai bagian dari kewajiban etis aparatur terhadap masyarakat.

Selain itu, perlindungan privasi yang sejalan dengan prinsip hifz al-mal dan hifz al-'ird menegaskan bahwa data masyarakat merupakan hak yang harus dijaga martabat dan keamanannya. Akuntabilitas dalam tata kelola digital, dengan demikian, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral, di mana setiap tindakan digital aparatur dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sosial digital sangat bergantung pada penerapan etika Islam secara konsisten dalam praktik pemerintahan.

5. IMPLIKASI PENELITIAN

5.1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Informasi Digital

Implementasi teknologi informasi dalam kebijakan sosial berbasis nilai-nilai Islam menunjukkan sistem informasi digital berperan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Oleh karena itu, pimpinan institusi pemerintahan perlu memastikan bahwa investasi teknologi dilakukan secara strategis, mencakup pengembangan infrastruktur digital yang memadai, pembaruan sistem secara berkala, serta integrasi antarsistem yang solid. Perencanaan manajerial yang tepat dapat memperkuat alur informasi, meminimalkan kesalahan administratif, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

5.2. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Digital

Temuan penelitian menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Manajemen organisasi perlu menerapkan prinsip amanah dalam pengelolaan data, keadilan dalam distribusi layanan, serta orientasi kemaslahatan dalam seluruh proses digital. Untuk itu, institusi pemerintah disarankan menyusun pedoman etika digital yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta memastikan aparatur memahami dan menerapkan prinsip tersebut dalam praktik kerja sehari-hari.

5.3. Pengembangan Kapasitas SDM dan Keamanan Informasi

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi teknologi informasi, seperti kesenjangan literasi digital, resistensi terhadap teknologi baru, dan isu keamanan data. Implikasi manajerial

yang perlu dilakukan adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi digital aparatur, serta penyediaan dukungan teknis yang memadai. Selain itu, manajemen perlu menetapkan kebijakan keamanan informasi yang ketat, termasuk pengaturan akses data, perlindungan sistem, dan prosedur mitigasi risiko, guna menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

5.4. Penguatan Partisipasi Publik dan Layanan Berbasis Data

Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi manajer publik untuk mengembangkan strategi kolaboratif dalam memahami kebutuhan masyarakat, mengelola aduan secara digital, serta meningkatkan partisipasi publik melalui kanal daring. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah menyediakan layanan berbasis data yang lebih responsif, mempercepat penyesuaian kebijakan, serta meningkatkan transparansi. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi kebijakan sosial di institusi pemerintahan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan, khususnya ketika digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga berperan dalam mendukung tata kelola kebijakan sosial yang lebih terstruktur dan transparan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian tata kelola Islam dan kebijakan digital dengan menegaskan bahwa nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan, memiliki peran dalam membimbing pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik pemerintahan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga berkaitan dengan cara aparatur mengelola sistem digital dan mengambil keputusan dalam implementasi kebijakan sosial. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian kebijakan publik yang selama ini lebih menekankan aspek teknis dengan memasukkan dimensi etika sebagai bagian dari tata kelola digital.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berfokus pada perspektif aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan belum sepenuhnya menangkap pandangan penerima kebijakan sosial sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan area dan jumlah responden, termasuk melibatkan lebih banyak institusi pemerintah dari berbagai jenis layanan serta kelompok masyarakat penerima kebijakan, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang juga perlu menelaah faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi implementasi kebijakan sosial digital, seperti keamanan data, tingkat literasi digital, dan efektivitas pelatihan teknologi bagi aparatur pemerintah, guna memperdalam pemahaman mengenai tata kelola kebijakan sosial digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

7. DEKLARASI

7.1. Tentang Penulis

Siti Nur Azizah (SN) https://orcid.org/0000-0003-4906-9650
Adhi Widyakto (AW) https://orcid.org/0009-0005-6929-5382
Thomas Green (TG) https://orcid.org/0009-0001-7048-2231

7.2. Kontribusi Penulis

Konseptualisasi dilakukan oleh SN. Metodologi dikembangkan oleh AW, sementara pengembangan perangkat lunak ditangani oleh TG. Validasi dilakukan oleh SN dan TG, sedangkan analisis formal dikerjakan oleh AW. TG bertanggung jawab atas investigasi dan pengelolaan data, sementara sumber daya disediakan oleh SN. Penulisan draf awal diselesaikan oleh SN dan TG, dengan tinjauan serta penyuntingan dilakukan oleh AW dan SN. Visualisasi dikerjakan oleh SN. Seluruh penulis, yaitu AW, TG, dan SN, telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip yang dipublikasikan.

7.3. Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis yang bersangkutan.

7.4. Pendanaan

Para penulis tidak menerima dukungan finansial apa pun untuk penelitian, penulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

7.5. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan, kepentingan finansial yang bersaing, atau hubungan pribadi yang dapat memengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. M. F. Saldanha, C. N. Dias, and S. Guillaumon, "Transparency and accountability in digital public services: Learning from the brazilian cases," *Government Information Quarterly*, vol. 39, no. 2, p. 101680, 2022.

[2] J. J. P. Latupeirissa, N. L. Y. Dewi, I. K. R. Prayana, M. B. Srikandi, S. A. Ramadiansyah, and I. B. G. A. Y. Pramana, "Transforming public service delivery: A comprehensive review of digitization initiatives," *Sustainability*, vol. 16, no. 7, p. 2818, 2024.

[3] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan presiden republik indonesia nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional," 2022, diakses pada 2025. [Online]. Available: https://jdih.maritim.go.id/perpres-1322022-arsitektur-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-nasional

[4] A. Z. Virendra, E. C. Hauzan, and J. U. Abbad, "Analysis of the role of information technology in public administration transformation," *Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, vol. 15, no. 2, pp. 65–72, 2025.

[5] D. S. S. Wuisan and A. Pratiangga, "Teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar di jawa barat digunakan sebagai sarana pendidikan," *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 13–17, 2023.

[6] N. S. Muchtasor, "Ethical pluralism in ai policy: A framework for islamic integration into global ai governance," *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, vol. 3, no. 3, pp. 191–203, 2025.

[7] A. Maulidiyah, "Dampak digitalisasi terhadap etika sosial dan nilai kemanusiaan dalam perspektif islam," *Al-Muntadā-Journal of Humaniora and Sciences*, vol. 1, no. 1, pp. 32–40, 2025.

[8] S. Harefa, "The fundamental principles of islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid sharia approach," *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, pp. 84–99, 2025.

[9] P. Sugiartini and L. Tamamiyah, "Inisiatif e-government di indonesia sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas publik," *Action Research Literate*, vol. 8, no. 4, pp. 950–956, 2024.

[10] M. M. Siahaan, R. A. Sunarjo, R. Sebastian, and S. M. Wahid, "The role of natural language processing in enhancing chatbot effectiveness for e-government services," *Journal of Computer Science and Technology Application*, vol. 2, no. 1, pp. 65–74, 2025.

[11] Z. Abdurrahman, "Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention," *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 1–19, 2025.

[12] Y. Altair, "The concept of al-hisbah in upholding public morals: Historical foundations and contemporary applications in modern society," *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, vol. 2, no. 2, pp. 75–82, 2025.

[13] U. Rahardja, P. Silvia, S. Hakiki, L. Devi *et al.*, "Pengaruh prinsip syariah pada manajemen dan kualitas tata kelola pendidikan: The influence of sharia principles on management and quality of educational governance," *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 3, no. 2, pp. 108–117, 2025.

[14] B. D. Kencono, H. H. Putri, and T. W. Handoko, "Transformasi pemerintahan digital: Tantangan dalam perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) di indonesia," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 2, pp. 1498–1506, 2024.

[15] F. Anggara, I. D. Pramudiana, E. Haryati, and S. Pramono, "Challenges and strategies in e-government implementation in a remote region in sumenep," *Journal of Governance and Public Administration*, vol. 2, no. 2, pp. 361–371, 2025.

[16] D. Hyka, A. Hyra, F. Basholli, B. Mema, and A. Basholli, "Data security in public and private administration: Challenges, trends, and effective protection in the era of digitalization," *Advanced Engineering Days (AED)*, vol. 7, pp. 125–127, 2023.

[17] R. Putri, A. Ramadhan, and M. Afif, "Perspektif islam terhadap integrasi perkembangan ilmu teknologi," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, vol. 2, no. 1 Juni, pp. 48–54, 2021.
[18] C. Casriyanti, "Strategi pengembangan sumber daya manusia di era digital pada perguruan tinggi keagamaan islam: Studi kasus pada iai pangeran dharma kusuma indramayu," *Jurnal Pendidikan Educandum*, vol. 5, no. 2, pp. 333–342, 2025.
[19] R. Hardiansyah and T. Jaffisa, "Peran sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan transparan (studi kasus pada kantor badan perencanaan pembangunan daerah kota medan)," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 4, pp. 5194–5206, 2024.
[20] B. Szedmák, L. Varga, and R. Z. Szabó, "Digital transformation of public services: The case of the document management application," *International Journal of Public Administration*, pp. 1–18, 2025.
[21] N. Erhan, "Evaluation of e-government implementation in indonesian local government (case study of the implementation of electronic monitoring and evaluation in balangan local government)," *JPAS (Journal of Public Administration Studies)*, vol. 2, no. 2, pp. 9–15, 2017.
[22] P. A. Sunarya, M. Asri, N. Azizah, C. P. Lim *et al.*, "Evaluation of educational information systems for data and decision management: Evaluasi sistem informasi pendidikan untuk pengelolaan data dan keputusan," *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 3, no. 2, pp. 118–126, 2025.
[23] D. N. Gultom, E. Khairina, and L. Salsabila, "Analisis efisiensi dan efektivitas e-government dalam administrasi publik," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 10, no. 1, pp. 128–136, 2024.
[24] O. Mustomi *et al.*, "Governing with amanah,'adalah, and maslahah: Islamic legal values in jakarta's one-stop public service under regional autonomy," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, vol. 14, no. 2, pp. 410–424, 2025.
[25] D. B. Setyarto, A. Alimuddin, M. Mulyaningsih, and L. Judijanto, "The role of e-government in increasing transparency and accountability of public administration in the digital era," *Edelweiss Applied Science and Technology*, vol. 9, no. 2, pp. 1771–1783, 2025.
[26] M. H. R. Chakim *et al.*, "Kemajuan teknologi di abad 21: Perubahan perspektif," *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 40–45, 2023.
[27] A. Ashar, I. Irwan, and H. Dema, "Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan e-government di desa sipodeceng," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, pp. 421–428, 2025.
[28] E. K. Dewi, Y. Muhaemin, G. A. Sitompul, R. Y. Parinduri, and M. Rika, "Digital transformation in public services: Evaluation of e-government implementation in indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 4, pp. 1–8, 2025.
[29] F. Mappisabbi, A. Haris, and W. Zuhri, "Implementasi e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di era digital," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, vol. 1, no. 2, pp. 174–184, 2024.
[30] A. Akhwany *et al.*, "Implementasi sistem informasi manajemen pelayanan (simpel) perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi riau," *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, pp. 136–139, 2025.
[31] S. Sharmin and R. H. Chowdhury, "Digital transformation in governance: The impact of e-governance on public administration and transparency," *Journal of Computer Science and Technology Studies*, vol. 7, no. 1, pp. 362–379, 2025.
[32] D. Mirza, N. Lastri, V. Aditiya *et al.*, "Optimizing digital public services for enhanced citizen satisfaction and transparent governance," 2025.
[33] B. Zhang, W. Dong, and J. Yao, "How does digital transformation of city governance affect environmental pollution: a natural experiment from the pilot policy of "national information city for public service" in china," *Sustainability*, vol. 14, no. 21, p. 14158, 2022.
[34] J. Jurana and A. Azma, "Integrasi nilai-nilai islam dalam pengembangan dan penggunaan teknologi di era digital," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, vol. 4, no. 1, pp. 530–533, 2025.
[35] F. A. Mappasere *et al.*, "The role of e-government in improving efficiency and transparency in public services in indonesia." *KnE Social Sciences*, 2025.
[36] U. Rahardja, "Blockchain education: as a challenge in the academic digitalization of higher education," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 4, no. 1, pp. 62–69, 2022.
[37] N. R. Ansari, U. Nurjaman *et al.*, "Relevansi pengembangan nilai-nilai islami dalam bidang manajemen

pendidikan," *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 66–78, 2025.

[38] M. Yusuf, N. Karim, R. M. Fatriani *et al.*, "Building digital inclusion and non-discriminatory services in jambi city government for vulnerable groups," *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, vol. 5, no. 2, pp. 115–131, 2024.

[39] A. Rahman, "The concept of ihsan in islamic religious education as the foundation of public service in the era of digital government: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 2, pp. 12 918–12 929, 2025.

[40] D. P. Maharani, A. S. Suryaningrum, D. A. Nuraini, O. W. N. Anggraini, D. A. Yuliani, A. Prahesti, and A. Nurrohim, "Integrasi nilai-nilai islam dalam pemanfaatan teknologi digital oleh generasi z di era moderen: Integration of islamic values in the use of digital technology by generation z in the modern era," *Dirasah: Jurnal Kajian Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 93–109, 2025.

[41] A. Williams, C. S. Bangun, and Y. Shino, "The urgency of digital literacy in indonesia on covid-19 pandemic," *Startupreneur Business Digital (SABDA Journal)*, vol. 1, no. 2, pp. 183–190, 2022.

[42] F. Fitriani, A. Nurmandi, H. Lawelai, A. N. Kasiwi, and M. Younus, "Trends and challenges of digital transformation in the public sector: Policy implications for improving public services in indonesian," *ARISTO*, vol. 13, no. 2, pp. 681–705, 2025.

[43] A. S. Madaki, K. Ahmad, and D. Singh, "It integration implementation in e-government public sector in developing countries: a systematic literature review and model development," *Transforming Government: People, Process and Policy*, vol. 18, no. 3, pp. 451–472, 2024.

[44] S. Subhan and I. Sartika, "Tantangan dan strategi implementasi spbe dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di indonesia," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 7, no. 6, pp. 4648–4656, 2025.

[45] S. M. H. Amiri, "Privacy in islam: What muslims should know about data protection," *Dhaka College*, 2025.

[46] D. Suwondo, "The legal protection of personal data in islamic perspective," *International Journal of Law Reconstruction*, vol. 7, no. 2, pp. 221–230, 2023.

[47] S. Thalib and H. S. Nugroho, "Efektivitas interoperabilitas data pelayanan" lapor" sleman sebagai perwujudan smart governance," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol. 10, no. 3, pp. 618–636, 2025.

[48] M. Budiarto, A. Asmawati, and M. Kurniawan, "Digital transformation of local government: Design and development of the pakuhaji district community service information system website," *International Journal of Cyber and IT Service Management*, vol. 4, no. 1, pp. 11–18, 2024.

[49] A. Setiawan *et al.*, "Penelitian metode campuran (mixed method)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 5, no. 2, pp. 1484–1491, 2025.

[50] N. Suriani, M. S. Jailani *et al.*, "Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 24–36, 2023.